



Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi

Nadila Chrishanum ¹⁾, Maulana Rifai ²⁾, Prilla Marsingga ³⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS Ronggowaluyo, Peseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

nadilachnm25@gmail.com 1)

maulana.rifai@staff.unsika.ac.id 2)

prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id 3)

Abstrak

Keberadaan permukiman kumuh di wilayah perkotaan mengakibatkan beragam masalah yang kompleks dan multidimensional bagi masyarakat maupun pemerintah. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang memiliki permasalahan permukiman kumuh, saat ini yang memiliki luas permukiman kumuh paling banyak di Kota Bekasi yakni kelurahan Sumur Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penanganan permukiman kumuh di kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategi oleh Wheleen and Hunger terdiri dari Analisis Lingkungan, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Kontrol. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kelurahan Sumur Batu menjadi salah satu wilayah prioritas hal tersebut terlihat dari kelurahan Sumur Batu mendapatkan program KOTAKU dari pemerintah pusat, terdapat program perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan SPAM. Kesimpulan dari penelitian ini terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu sudah dilakukan secara bertahap sampai dengan saat ini namun terdapat beberapa hambatan dan kelemahan pada proses pelaksanaannya.

Kata kunci: Manajemen Strategi ; Pemerintah Daerah ; Permukiman Kumuh.

Abstract

The existence of slum settlements in urban areas results in a variety of complex and multidimensional problems for the community and the government. Bekasi City is one of the cities that has the problem of slum settlements, currently the largest slum area in Bekasi is the Sumur Batu village. This study aims to analyze how strategic management is carried out by the Regional Government through the Department of Housing for Settlement and Land Areas in handling slum settlements in Sumur Batu Village, Bekasi City. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. This study uses the theory of Strategic Management by Wheleen and Hunger consisting of Environmental Analysis, Strategy Formulation, Strategy Implementation, and Evaluation and Control. The results showed that the Sumur Batu village was one of the priority areas, this could be seen from the Sumur Batu village getting the KOTAKU program from the central government, there was a program for repairing uninhabitable houses, and the construction of SPAM. The conclusion of this study related to the handling of slum settlements in Sumur Batu Village has been carried out in stages until now, but there are several obstacles and weaknesses in the implementation process.

Key words: Strategic Management ; Local Government ; Slums.



PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menempati wilayah perkotaan, maka meningkat pula tekanan sosial, ekonomi serta lingkungan hidup di wilayah tersebut. Di tahun 2014, Persatuan Bangsa-Bangsa menyebutkan sebesar 54% penduduk sudah tinggal di wilayah kota dan di tahun 2050 jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 66%. Hal tersebut secara langsung membentuk perkotaan menjadi pusat konsentrasi populasi penduduk, interaksi sosial budaya, dampak lingkungan, kemanusiaan, kegiatan ekonomi serta urbanisasi (Kementerian PUPR, 2017). Atas dasar tersebut, maka sangat diperlukan suatu cara mengarahkan perkembangan perkotaan menjadi lebih berkelanjutan.

Isu mengenai permasalahan kota dan permukiman berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun RPJMN tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Pada tujuan SDGs ke 11 yakni menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target atau poin pertama pada tujuan ke 11 yaitu meningkatkan mutu permukiman kumuh, melalui RPJMN 2015–2019 kegiatan permukiman di Indonesia mempunyai target universal akses 100-0-100. Penduduk Indonesia dapat mengakses 100% air bersih, 0% permukiman kumuh dan 100% akses terhadap sanitasi yang layak, dalam hal ini salah satu komponennya yakni pengentasan permukiman kumuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman, yang dimaksud permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni ditandai ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Indonesia merupakan negara berkembang yang juga memiliki permasalahan permukiman kumuh. Adanya kecenderungan peningkatan luas permukiman kumuh pun ikut menjadi isu kebijakan tata ruang yang strategis di Indonesia. Di kawasan perkotaan, telah terjadi kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan penduduk sehingga memicu potensi bertambahnya jumlah penduduk sebesar 32% yang bertempat tinggal di kawasan permukiman kumuh (Budi Prayitno, 2014).

Menurut hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya bahwa pada tahun 2016 terdapat 35,291 hektar permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, didapati bahwa pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat masuk kedalam 5 besar provinsi yang memiliki rumah tangga kumuh perkotaan terbanyak di Indonesia dengan menempati urutan keempat yakni sebesar 19,86% setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki permukiman kumuh. Munculnya permukiman kumuh di Kota Bekasi tidak terlepas dari perkembangan kota yang semakin pesat. Jumlah penduduk yang meningkat lebih banyak disumbang dari urbanisasi dari pada angka kelahiran, berawal dari urbanisasi yang tinggi tersebut kemudian membawa dampak bagi penurunan kualitas lingkungan permukiman menjadi lebih padat dan cenderung kumuh. Di Kota Bekasi luas permukiman kumuh sesuai Surat Keputusan Wali Kota pada tahun 2016 terdapat 443 ha luas wilayah kumuh dan sebanyak 112 titik kumuh yang tersebar di 12 kecamatan dan 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 kelurahan Margahayu merupakan kelurahan yang memiliki permukiman kumuh paling banyak di kota Bekasi yakni seluas 28,79 ha. Namun, untuk saat ini menurut hasil perhitungan terbaru pada tahun 2020 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi menunjukkan bahwa kelurahan Sumur Batu menjadi kelurahan yang menyumbang permukiman kumuh paling banyak di Kota Bekasi dengan luas 27,6 ha. Kelurahan Sumur Batu berbatasan langsung dengan area TPA Bantargebang dan area TPA Sumur Batu.

Keberadaan TPA selain berdampak positif juga sebagai salah satu yang memicu permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu faktor lainnya yakni terdapat 7 indikator permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Sumur Batu diantaranya permasalahan ketidak teraturan bangunan, kualitas permukaan jalan yang masih kurang, kualitas konstruksi drainase yang kurang, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, sarana dan

prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dan sarana dan prasarana proteksi kebakaran (Dokumen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2021).

Kelurahan Sumur Batu sudah memiliki permasalahan kumuh sejak lama namun dalam penanganannya pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan pembenhannya secara bertahap hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan pendanaan APBD kota Bekasi mengakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan permukiman kumuh terbatas sehingga dalam penganggaran menganut sistem prioritas. Terdapat 3 program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi diantaranya program KOTAKU dari pemerintah pusat yang dilakukan sejak tahun 2018 secara bertahap dan tahun 2020 kembali mendapatkan program KOTAKU bersama dengan 4 kelurahan lainnya. Selain itu terdapat program RUTILAHU yaitu perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan SPAM.

Beragam permasalahan yang timbul dari permukiman kumuh kemudian nantinya akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang menghuni lingkungan tersebut. Berikut daftar lokasi di kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi yang termasuk kawasan permukiman kumuh akan dijabarkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Daftar Lokasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi

RT/RW	Lingkup Administrasi		LUAS (HA)
	Kelurahan	Kecamatan	
RT 002-RW 001	Sumur Batu	Bantargebang	10,78
RT 001-RW 003	Sumur Batu	Bantargebang	2,15
RT 001-RW 002	Sumur Batu	Bantargebang	2,1
RT 004-RW 002	Sumur Batu	Bantargebang	2,2
RT 001-RW 004	Sumur Batu	Bantargebang	2,12
RT 004-RW 001	Sumur Batu	Bantargebang	2,5
RT 002-RW 002	Sumur Batu	Bantargebang	1,23
RT 002-RW 003	Sumur Batu	Bantargebang	2,37
RT 002-RW 004	Sumur Batu	Bantargebang	2,15
TOTAL			27,6 ha

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2021

Pada hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terkait pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi menurut wawancara dengan kepala seksi Pembinaan dan Penyuluhan Perumahan, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah berupaya melakukan penuntasan Permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu sampai dengan saat ini secara bertahap namun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun beberapa hambatan diantaranya,: Pertama, pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar baik itu bagi masyarakat maupun pemerintah. Pandemi covid-19 pun membawa pengaruh bagi penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi anggaran yang ada menjadi terbatas hal ini dikarenakan sejumlah anggaran yang sudah direncanakan untuk pembangunan infrastruktur dalam penanganan permukiman kumuh dialihkan untuk fokus (refocusing) dalam penanganan wabah tersebut. Kedua, program penanganan permukiman kumuh di kelurahan Sumur Batu belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di sekitar permukiman kumuh tersebut hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi bahwa dinas memiliki program untuk sosialisasi kepada masyarakat per kelurahan pada tahun lalu namun untuk tahun ini terhenti karena tidak adanya anggaran. Ketiga, dalam pengawasan dilapangan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.



Atas dasar tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan efektivitas pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mampu menghadapi tantangan pembangunan dimasa yang akan datang. Manajemen Strategi dalam penelitian ini merupakan proses usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi demi mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh menjadi layak huni serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh dengan menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang memadai.

Dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya pertama penelitian yang dilakukan oleh Grein George Theodoron Wutoy (2019) mengenai pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Menuju Kota Ideal (Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh). Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaroful Husna (2018) mengenai pelaksanaan Implementasi Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi, dengan menggunakan teori manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012) yang terdiri dari 4 indikator diantaranya analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol.

Berdasarkan uraian diatas dibutuhkan pengambilan keputusan strategi melalui proses manajemen strategi yang baik dan tepat, sehingga strategi tersebut dapat diwujudkan menjadi program yang sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada. Mengingat keberadaan permukiman kumuh di wilayah perkotaan mengakibatkan beragam masalah yang kompleks dan multidimensional bagi masyarakat maupun pemerintah, adapun permasalahan tersebut baik ditinjau dari segi lingkungan, kesehatan, keruangan, sosial, dan estetika wilayah. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana manajemen strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Muchtar (2013 : 29) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yakni studi pustaka yaitu proses pengumpulan data diperoleh dari berbagai buku, media online, dan dokumen penting berkaitan dengan penelitian, serta studi lapangan yaitu proses pengumpulan data diperoleh dengan teknik yakni observasi dan wawancara. Adapun metode analisis data yang digunakan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan dalam tiga tahap dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian lebih lanjut mengenai Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi, peneliti akan menjelaskan hasil temuan lapangannya berdasarkan teori manajemen strategis menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger (2012). Dalam teori tersebut menggambarkan variabel yang digunakan untuk menentukan kebijakan yang harus diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan hal ini merupakan suatu langkah yang harus ditempuh agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teori ini terbagi dalam beberapa

indikator diantaranya Analisis Lingkungan, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Kontrol. Indikator tersebut akan dijabarkan lebih rinci, sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan dalam proses perumusan strategi suatu organisasi diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta mencari informasi dari lingkungan organisasi. Hal tersebut guna mengidentifikasi faktor-faktor strategis baik dari lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman maupun lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang akan menentukan masa depan organisasi.

a. Lingkungan eksternal

Peluang terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu. Pertama, adanya kolaborasi serta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan serta tingkat yang paling kecil yaitu RT dan RW serta masyarakat. Pihak swasta turut membantu dalam hal pembiayaan dalam bentuk CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) namun masih belum maksimal. Kedua, dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk program KOTAKU. Ketiga, dukungan juga diberikan oleh masyarakat setempat dengan membentuk suatu wadah yakni Badan Keswadayaan Masyarakat yang menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Keempat, adanya bantuan dana kompensasi yang diberikan sebagai dampak dari keberadaan TPA Bantargebang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi hasilnya direalisasikan dalam berbagai kebutuhan masyarakat misalnya perbaikan jalan yang ada, sarana pendidikan, sarana kesehatan sarana peribadatan, dll, masyarakat juga menerima dana kompensasi per KK.

Ancaman (*threats*) terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu. Pertama, permasalahan lingkungan di Kelurahan Sumur Batu sudah sangat lama hal ini dikarenakan letak Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi berdekatan dengan TPA Bantargebang dan TPA Sumur Batu yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi kumuh serta target 0% permukiman kumuh tidak dapat dicapai dengan cepat dan mudah. Kedua, adanya ancaman berupa bencana alam seperti hujan, banjir dan longsor yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana permukiman di Kelurahan Sumur Batu. Ketiga, adanya ancaman penduduk luar yang datang dari luar daerah yang keberadaannya belum jelas karena tidak melaporkan diri dan mendirikan bangunan yang letaknya tidak beraturan. Keempat, adanya ancaman dari sisi masyarakat yakni kurangnya kepedulian warga akan kondisi lingkungan sekitar terlihat dari sampah yang berserakan dan tidak langsung dibakar atau dikumpulkan terlebih dahulu dalam sebuah wadah sehingga menambah kesan kumuh di wilayah tersebut.

b. Lingkungan internal

Kekuatan (*strength*) terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu. Pertama, adanya SK Walikota Bekasi tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Bekasi yang dijadikan acuan dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi. Kedua, Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu sudah bekerja sesuai tupoksi. Dalam hal ini kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) No. 91 tahun 2016.

Kelemahan (*weakness*) terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu. Pertama, keterbatasan kemampuan pendanaan APBD kota Bekasi mengakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan permukiman kumuh terbatas sehingga dalam penganggaran menganut sistem prioritas. Kedua, belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Ketiga, pengawasan yang dilakukan belum optimal karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Keempat, pandemi covid 19 yang melanda dunia khususnya Indonesia memberikan dampak pada pelaksanaan pembangunan, terkait pelaksanaan penanganan permukiman kumuh menjadi terhambat karena adanya larangan untuk berkumpul dimasa pandemi.

2. Formulasi Strategi



Menurut Wheelen dan Hunger (2012), Perumusan Strategi adalah pengembangan jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan Strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

Dalam Formulasi strategi terdapat misi yang harus ditentukan dan alasan mengapa tujuan mengapa organisasi hidup. Oleh sebab itu, yang menjadi misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sama dengan misi yang dimiliki oleh kota Bekasi yakni diantaranya pertama, meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik; Kedua, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai; Ketiga, meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing; Keempat meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif; Kelima, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dalam Formulasi Strategi terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu, dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Bekasi mempunyai tujuan yakni menuntaskan permasalahan permukiman kumuh menjadi 0% dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh menjadi layak huni serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh dengan menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang memadai hal tersebut dilakukan guna mendukung target pemerintah Indonesia yakni 100% layak air minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak serta membantu pemerintah dalam mencapai SDGs pada tahun 2030

Dalam Formulasi Strategi terdapat strategi yang harus dikembangkan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Permasalahan permukiman kumuh di kelurahan Sumur Batu merupakan permasalahan yang kompleks dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi kumuh diantaranya mengenai sarana dan prasarana infrastruktur, sosial masyarakat, ekonomi, lingkungan, pendidikan serta kesehatan sehingga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani permukiman kumuh di butuhkan kolaborasi antar stakeholder baik Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh, pihak swasta, kelurahan serta masyarakat yang menghuni permukiman tersebut. Dalam hal ini strategi yang dilakukan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu terdapat dua yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Bekasi melakukan tugasnya dalam hal pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman kumuh. Dengan melakukan pemugaran kembali bangunan beserta sarana dan prasarana permukiman. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terdapat strategi yang dilakukan yakni peremajaan dengan membuat rumah susun sewa namun, hal ini masih dalam perbincangan karena melihat dari kondisi lingkungan yang ada dimana adanya gunung sampah TPA yang dikhawatirkan membahayakan bagi masyarakat yang menghuni rusunawa tersebut akibat adanya gas metana yang dihasilkan.

Dalam Formulasi Strategi juga terdapat penetapan pedoman kebijakan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi. Adapun yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan kebijakan dalam pelaksanaannya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya ada Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Selain itu, Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 600/kep.375.A-Disbangkim/VI/2016 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bekasi namun untuk saat ini sudah ada surat keputusan Wali Kota Bekasi yang terbaru tetapi belum dipublikasikan karena sedang dalam proses pengesahan. Dalam hal ini yang menjadi kekurangan adalah pemerintah Daerah Kota Bekasi belum mempunyai Peraturan Daerah terkait pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman



dan Pertanahan mengenai Perda sudah diusulkan ke Pemerintah Daerah untuk diadakan Perda terkait penanganan permukiman kumuh dan kemudian akan dibahas lebih lanjut.

3. Implementasi Strategi

Menurut Wheelen dan Hunger (2012), implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

Dalam Implementasi Strategi terdapat penjabaran program atau kegiatan apa saja dilakukan. Adapun program atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penanganan permukiman kumuh di kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi terdapat 3 program diantaranya Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang mana program ini telah dilakukan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2020 diadakan kembali program KOTAKU bersama dengan 4 kelurahan lainnya dengan kegiatan pekerjaan drainase lingkungan dan jalan beton, penyediaan gerobak sampah serta pembangunan taman untuk ruang terbuka hijau. Kedua, Program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) yang merupakan program perbaikan rumah tinggal dengan kondisi fisik dan prasarana bangunan yang tidak layak huni sehingga menjadi rumah tinggal yang layak huni, sehat dan memiliki prasarana dasar yang layak. Hal ini dilakukan guna meningkatkan derajat kehidupan masyarakat serta memerangi dan mengurangi kemiskinan. Ketiga adanya program atau kegiatan pembangunan SPAM di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi.

Dalam Implementasi Strategi terdapat penjabaran anggaran, adapun anggaran yang digunakan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi ialah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bantuan DKI Jakarta serta swadaya masyarakat. Adapun Program KOTAKU dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, Program RUTILAHU berasal dari APBN melalui Bantuan Kementerian PUPERA, APBD Propinsi Jawa Barat, APBD Kota Bekasi, Bantuan DKI Jakarta dan Swadaya Masyarakat. Sedangkan program SPAM berasal APBD Kota Bekasi. Namun, dalam hal anggaran ini terdapat kendala yakni anggaran yang dibutuhkan masih terbatas, ditambah dengan adanya pandemi dimana pemerintah melakukan recoufusing sejumlah anggaran pembangunan untuk penanganan covid 19.

Dalam Implementasi Strategi terdapat penjabaran prosedur, adapun prosedur yang ada dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Dalam hal penanganan permukiman kumuh di kelurahan Sumur Batu terdapat tahapan kegiatan yang dilakukan dimulai dari tahap, pertama, mengidentifikasi berdasarkan 7 indikator di wilayah Kelurahan Sumur Batu yaitu penataan bangunan, jalan, drainase, sanitasi, pengolaan limbah domestik, terlayani PDAM kemudian terlayani pemadam kebakaran, dan terakhir pengelolaan persampahannya. Setelah melakukan penilaian di kelurahan sumur batu berdasarkan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2018 maka terdapat lah beberapa titik kumuh. Kedua, dari data tersebut kemudian merencanakan untuk membuat DED dan RAB. Ketiga, setelah itu melakukan usulan ke Pemerintah Pusat dan usulan ke APBD untuk melakukan kegiatan pembangunan yang ada di kelurahan Sumur Batu berdasarkan hasil survey. Dan keempat, melakukan pelaksanaan pembangunannya.

4. Evaluasi dan Kontrol

Menurut Wheelen dan Hunger (2012), Evaluasi dan Kontrol adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajemer disemua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen evaluasi dan kontrol dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

Dalam tahap Evaluasi dan Kontrol terdapat penjabaran mengenai evaluasi, terkait evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam penanganan permukiman kumuh, sudah dilakukan ada evaluasi yang dilakukan setiap satu tahun sekali dengan mengundang pihak kelurahan, BKM serta perwakilan masyarakat dan juga evaluasi yang dilakukan tidak menentu tergantung jika ada kendala dan



masalah dilapangan maka evaluasi dilakukan secara sering. Namun dari sisi masyarakat, Dinas tidak melakukan upaya pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kontrol atau peninjauan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaukan kontrol atau peninjauan dilapangan namun, peninjauan ini tidak dilakukan secara berkala hanya pada saat pelaksanaan pembangunannya saja hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang menangani permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu jumlahnya terbatas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penjabaran penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen strategi yang dilakukan sudah sesuai dengan empat proses manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012). Namun, dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan masih terdapatnya kendala serta kelemahan pada tahapan-tahapan yang ada diantaranya pada tahap Formulasi Strategi, Implementasi Strategi serta Evaluasi dan Kontrol. Dalam tahap Formulasi Strategi permasalahan permukiman kumuh di kelurahan Sumur Batu merupakan permasalahan yang kompleks dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi kumuh diantaranya mengenai sarana dan prasarana infrastruktur, sosial masyarakat, ekonomi, lingkungan, pendidikan serta kesehatan sehingga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani permukiman kumuh di butuhkan kolaborasi antar stakeholder baik Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh, pihak swasta, kelurahan serta masyarakat yang menghuni permukiman tersebut. Adapun kelemahan pada tahap Formulasi Strategi terlihat pada indikator kebijakan yakni Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kummentasi Strategi terdapat kelemahan pada indikator anggaran dimana anggaran yang ada dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu masih terbatas, Dalam tahapan Evaluasi dan Kontrol masih terdapat kelemahan pada indikator kontrol dimana kontrol yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu masih belum optimal karena pelaksanaan kontrol kegiatan dilapangannya belum dilakukan secara rutin hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi dalam upaya penanganan permukiman kumuh.

Saran yang dapat peneliti berikan terkait Manajemen Strategi Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi pada setiap tahapan Manajemen Strategi yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger (2012) adalah sebagai berikut : pada tahap Analisis Lingkungan, diharapkan untuk dapat lebih mengoptimalkan proses analisis SWOT sehingga dalam pelaksanaan strategi maupun program tidak terjadi hambatan yang sama pada tahun berikutnya. Pada tahap Formulasi Strategi, memperkuat kerjasama serta koordinasi dengan stakeholder baik OPD yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh, pihak swasta, kelurahan, lembaga kemasyarakatan kelurahan Sumur Batu, serta masyarakat sehingga diharapkan dapat dengan cepat menciptakan permukiman yang bebas kumuh 0% baik ditinjau dari segi lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Selain itu mempercepat proses pengesahan Peraturan Daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, karena hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai pijakan dalam melakukan kegiatan dalam pengotimalan upaya penanganan permukiman kumuh. Pada tahap Implementasi Strategi, dalam indikator anggaran diharapkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi lebih menggali yang dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam upaya penanganan permukiman kumuh salah satunya bekerja sama dengan pihak swasta dan mengoptimalkan sumber dana yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pada tahap Evaluasi dan Program, dalam indikator evaluasi diharapkan dari hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat melakukan analisis strategi yang digunakan pada tahun berikutnya sehingga strategi yang didapat sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan serta dapat mengambil tindakan korektif untuk



rencana jangka pendek dan jangka panjang. Dalam indikator kontrol, diharapkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat melakukan perekrutan atau penambahan jumlah anggota yang sesuai dengan bidangnya sehingga dalam pelaksanaan kontrol atau pemantauan kegiatan dan program yang ada dapat dilakukan secara maksimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang turut mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Tanpa bantuan dari seluruh pihak terkait, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan diantaranya pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi serta pihak Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi yang turut membantu dalam memberikan informasi serta data terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Hunger J dan Wheelen Thomas L. 2012. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI.
- Prayitno, Budi. 2014. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019
- Peraturan Menteri PUPR Nomor: 14/PRT/M/2018 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh
- Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 600/kep.375.A-Disbangkim/VI/2016 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bekasi
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023
- Faturachman Alputra Sudirman dan Phradiansah. 2019. *Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan : Pengelolaan Sampah Kota Kendari*. Jurnal Sosio Politik Vol. 5 No. 2, 2019.
- Nila Kesuma, Haryadi, dan Agam Marsoyo. 2003. *Perubahan Fisik Keruangan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantargebang Kota Bekasi*. Manusia dan Lingkungan Vol X No. 2, 2003.
- Anindita Wilandari dan Haryo Sulistyarso. 2017. *Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketing Udik dan Sumur Batu Kota Bekasi*